

**PERAN PENDIDIKAN LITERASI DIGITAL DALAM BELA NEGARA:
MENGATASI DISINFORMASI DAN POLARISASI DI ERA MEDIA SOSIAL**

Ameylia Nazarina¹, Jodi Soebagio², Reagan Alexandre³, Fredrick Yappy⁴,
Novenda M. M Lontoh⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Tarumanagara

e-mail: ameylia.705220152@stu.untar.ac.id

ABSTRAK

Hoaks adalah fenomena yang mengkhawatirkan di masa kini karena mampu mempengaruhi cara orang berpikir, mengurangi kualitas informasi, serta menimbulkan perpecahan di masyarakat. Masalah ini cepat menyebar karena tingkat literasi digital masyarakat yang rendah, cara berpikir yang bias, dan cara kerja algoritma di media sosial. Selain itu, orang cenderung lebih percaya pada informasi yang sesuai dengan keyakinan atau kelompok mereka. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana literasi digital bisa menjadi langkah efektif dalam menghadapi hoaks dan mencegah perpecahan atau polarisasi di era digital saat ini. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan sistematik *literature review* dengan menganalisis beberapa jurnal ilmiah dari tahun 2019 hingga 2025. Hasil menunjukkan bahwa literasi digital sangat penting dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis, mengenali berita palsu, serta membentuk sikap yang bijak dalam menggunakan media sosial. Literasi digital juga bisa dianggap sebagai bagian dari bela negara modern yang membantu memperkuat persatuan sosial dan ketahanan bangsa. Kesimpulannya, meningkatkan literasi digital secara menyeluruh, termasuk aspek teknis, cara berpikir, dan sikap sosial-emosional, adalah kunci untuk membangun masyarakat yang cerdas dan kuat terhadap informasi yang tidak benar atau hoaks.

Kata Kunci: *Hoaks; Polarisasi; Literasi Digital; Bela Negara*

ABSTRACT

Hoaxes are a worrying phenomenon today because they can influence the way people think, reduce the quality of information, and cause divisions in society. This problem spreads quickly due to low levels of digital literacy, biased thinking, and the way algorithms work on social media. In addition, people tend to believe information that fits their beliefs or groups. This study aims to understand how digital literacy can be an effective measure in combating hoaxes and preventing division or polarization in today's digital age. This study uses a systematic literature review method by analyzing several scientific journals from 2019 to 2025. The results show that digital literacy is very important in improving critical thinking skills, recognizing fake news, and forming a wise attitude in using social media. Digital literacy can also be considered part of modern national defense that helps strengthen social unity and national resilience. In conclusion, comprehensively improving digital literacy, including technical aspects, ways of thinking, and socio-emotional attitudes, is key to building a society that is smart and strong against false information or hoaxes.

Keywords: *Hoaxes; Polarization; Digital Literacy; National Defense*

A. PENDAHULUAN

Hoaks merupakan salah satu fenomena paling problematis dalam era informasi digital saat ini. Secara sederhana, hoaks dapat dipahami sebagai informasi palsu yang memang secara sengaja diproduksi dan disebarakan dengan tujuan untuk menyesatkan masyarakat, memprovokasi, menciptakan kebingungan, bahkan merugikan pihak tertentu. Istilah hoaks sendiri bukanlah istilah baru. Secara etimologis, kata ini telah dikenal sejak akhir abad ke-18 dalam bahasa Inggris, berasal dari kata *hocus* atau *hocus-pocus*, yang bermakna tipuan atau pengelabuan (Etymonline, 2023). Dalam dunia akademik, penggunaan awal istilah hoaks dapat ditelusuri pada kasus Piltdown Man yang dibongkar sebagai penipuan ilmiah dalam jurnal *Nature* tahun 1953 dan *Science* tahun 1954, di mana hoaks dipahami sebagai bentuk penipuan publik yang disengaja dan dipublikasikan seolah-olah kebenaran ilmiah (Nature, 1953; Straus, 1954). Dalam perkembangan literatur

kontemporer, hoaks sering disamakan dengan *disinformation*, yakni informasi palsu yang sengaja diproduksi untuk tujuan tertentu, berbeda dengan *misinformation* yang biasanya muncul tanpa niat menipu (Beauvais, 2022; Aïmeur dkk., 2023).

Batoebara & Hasugian (2023) menguraikan berbagai jenis hoaks, antara lain seperti satire atau parodi yang kerap disalahpahami sebagai sebuah fakta, konten menyesatkan yang hanya mengambil sebagian informasi untuk mendukung klaim tertentu, pesan berantai yang menimbulkan ketakutan atau rasa percaya tanpa dasar, penipuan hadiah atau scam untuk keuntungan finansial, hingga manipulasi foto atau video yang diputus dari konteks aslinya. Tipologi ini penting karena menjelaskan bahwa hoaks bekerja bukan hanya lewat kebohongan terang-terangan, tetapi juga melalui distorsi, framing, dan permainan emosi. Hoaks seringkali memanfaatkan aspek emosional masyarakat, baik itu ketakutan, amarah, maupun simpati, agar orang lebih mudah percaya dan

terdorong untuk membagikannya kembali. Berdasarkan data dari MAFINDO (dalam Batoebara & Hasugian, 2023), menemukan sekitar 997 hoaks pada tahun 2018, dan jumlah ini melonjak menjadi 1.221 pada 2019. Jika dihitung secara rata-rata, terdapat sekitar 3–4 hoaks baru yang muncul setiap hari. Angka tersebut menunjukkan bagaimana deras nya arus informasi palsu yang beredar, terutama pada momentum politik seperti pemilihan umum yang memang rawan polarisasi. Dari sisi kanal penyebaran, data yang dikutip dalam jurnal yang sama menunjukkan bahwa WhatsApp menjadi *platform* paling dominan di Indonesia dengan tingkat penetrasi 92,1% pengguna internet pada Januari 2023, disusul oleh media sosial lain seperti Facebook dan Instagram. Fakta ini memperkuat argumentasi bahwa aplikasi percakapan dan media sosial adalah saluran utama penyebaran hoaks, karena kemudahan berbagi informasi tanpa verifikasi terlebih dahulu.

Selain faktor teknologi dan tingginya penggunaan media sosial, kerentanan masyarakat terhadap

hoaks juga diperparah oleh rendahnya kualitas literasi digital. Syah et al. (2025) dalam *Studies in Media and Communication* mencatat bahwa Indeks Literasi Digital Indonesia pada tahun 2022 hanya mencapai skor 3,54 dari skala 5, dengan dimensi terendah pada aspek *digital safety*. Angka ini menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat Indonesia dalam melindungi diri dari ancaman digital, termasuk hoaks, masih lemah. Dengan literasi yang rendah, masyarakat cenderung kesulitan membedakan informasi yang benar dengan yang palsu, apalagi ketika hoaks dikemas secara meyakinkan. Hal ini menjelaskan mengapa meskipun akses internet semakin luas, kerentanan terhadap hoaks tetap tinggi. Dari perspektif psikologis, penyebaran hoaks tidak bisa dilepaskan dari kecenderungan kognitif manusia. Hatoguan et al. (2025) dalam *Indonesian Research Journal on Education (IRJE)* menguraikan beberapa mekanisme psikologis yang membuat hoaks begitu efektif. Pertama, *confirmation bias*, yaitu kecenderungan seseorang untuk menerima informasi yang sesuai dengan

keyakinan atau pandangan pribadinya. Kedua, *illusory truth effect*, yaitu semakin sering sebuah informasi diulang, semakin besar kecenderungan orang untuk mempercayainya meskipun tidak benar. Ketiga, validasi sosial, di mana informasi yang disebar oleh teman atau kerabat dianggap lebih dapat dipercaya. Faktor-faktor inilah yang menjelaskan mengapa hoaks tidak hanya menyebar cepat, tetapi juga sulit dilawan, karena ia berakar pada cara berpikir dan berinteraksi manusia sehari-hari.

Dalam konteks hukum, hoaks menjadi isu serius karena dampaknya yang luas terhadap masyarakat. Puspaningrum et al. (2025) dalam *RIGGS Journal* menyoroti Pasal 28 UU ITE yang digunakan untuk menjerat penyebar hoaks. Namun, di sisi lain, penegakan hukum menghadapi dilema besar: unsur kesengajaan (*mens rea*) harus dibuktikan, sehingga sulit membedakan antara pembuat hoaks yang berniat jahat dengan pengguna biasa yang sekadar membagikan informasi tanpa tahu kebenarannya. Kerancuan ini berpotensi menimbulkan multitafsir dan

membuka ruang gesekan dengan prinsip kebebasan berekspresi. Artinya, definisi dan pembuktian hoaks bukan hanya perkara teknis hukum, melainkan juga menyangkut keseimbangan antara perlindungan masyarakat dari informasi berbahaya dan menjaga hak warga negara untuk berpendapat. Dengan demikian, hoaks di media sosial tidak hanya berdampak pada kualitas informasi, tetapi juga dapat mempengaruhi struktur sosial dan hubungan antar kelompok di masyarakat. Salah satu dampak nyata dari maraknya hoaks adalah munculnya polarisasi, yakni perpecahan tajam dalam masyarakat akibat terfragmentasinya informasi dan opini di media sosial.

Polarisasi politik adalah kondisi ketika masyarakat terbelah menjadi kelompok dengan pandangan berbeda secara ekstrim sehingga ruang dialog semakin menyempit (Daeli et al., 2024). Algoritma media sosial memperkuat situasi ini dengan menciptakan *echo chamber*, di mana pengguna hanya terpapar informasi yang mendukung keyakinannya, sementara pandangan berbeda cenderung

diabaikan (Sugiono, 2021). Hal ini menjelaskan mengapa kelompok-kelompok tertentu mudah mengeras dalam posisinya, sebagaimana terlihat pada studi kasus gerakan anti-vaksin yang menunjukkan bagaimana bias konfirmasi dan pesan emosional memperdalam polarisasi (Rabb et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa polarisasi diperkuat oleh hoaks, algoritma media sosial, dan bias kognitif seperti konfirmasi bias merupakan ancaman nyata bagi kohesi sosial. Rahmawati (2018) menegaskan bahwa polarisasi akibat algoritma media sosial dapat melemahkan ketahanan bangsa, sehingga kesadaran bela negara menjadi semakin penting di era digital.

Fenomena maraknya hoaks yang tersebar dan terpolarisasi seperti ini tidak hanya disebabkan oleh kurangnya literasi atau keterampilan teknis dalam verifikasi informasi saja, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh adanya dinamika identitas sosial dalam masyarakat. Menurut Tajfel & Turner (1979), *Social identity theory* menyatakan bahwa individu membentuk bagian penting dari identitas diri melalui keanggotaan dalam kelompok sosial

ingroup dan melakukan perbandingan dengan *outgroup*. Identitas ini membuat individu lebih cenderung menerima, menyebarkan, atau membela informasi yang selaras dengan nilai dan norma kelompoknya, meskipun secara objektif buktinya masih meragukan. Penelitian terbaru mendukung hal ini, hasil meta analisis dari PNAS (2024) menemukan bahwa faktor seperti *ideological congruency* (keselarasan ideologis) dan identitas politik sangat mempengaruhi kerentanan seseorang terhadap *misinformation*. Sebuah intervensi berbasis identitas yang disebut *identity-based intervention* menunjukkan bahwa ketika norma kelompok intern "*ingroup norms*" disorot, kecenderungan untuk membagikan konten partisans misinformation menurun secara signifikan. Di Indonesia, studi yang dilakukan oleh Dulkiah.M (2023) di Jawa Barat menemukan bahwa kepercayaan sosial dalam komunitas dan persepsi bahwa suatu informasi "dari kita" atau "untuk kita" memperkuat kecenderungan untuk mempercayai berita palsu. Selain itu, penelitian di Aceh oleh Syam &

Nurrahmi (2020) menunjukkan bahwa meskipun ada upaya literasi digital di institusi pendidikan, mahasiswa masih mengalami kesulitan dalam membedakan berita palsu dan benar, terutama saat informasi tersebut berasal dari kelompok yang mereka identifikasi sebagai ingroup. Oleh karena itu, literasi digital dalam konteks bela negara perlu dirancang bukan hanya sebagai peningkatan pengetahuan dan keterampilan verifikasi, tetapi juga harus mempertimbangkan identitas kelompok sosial dan norma kolektif. Upaya ini harus mendorong pembentukan identitas kebangsaan sebagai *superordinate identity* yang mampu memperkuat kohesi sosial dan ketahanan terhadap polarisasi informasi.

Bela negara sangat penting untuk dilakukan. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 30 ayat 1, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Salah satu bentuk partisipasi tersebut adalah melalui bela negara, yang merupakan kewajiban bagi seluruh warga negara (Yulnelly & Setyawati, 2022). Bela negara

identik dengan istilah angkat senjata, namun dalam era digital, konsep bela negara telah berkembang. Bela negara kini juga mencakup pemanfaatan teknologi untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan menghadapi tantangan baru (Akbar et al., 2024). Salah satu bentuk bela negara yang penting untuk dilakukan adalah melalui literasi digital (Mufarriq, 2021). Ditengah cepatnya dan bervariasinya pengembangan teknologi digital, individu dituntut untuk menumbuhkan skil teknis, skil kognitif, dan skil sosiologi guna menyelesaikan tugas dan masalah yang ada di dunia digital (Eshet, 2004). Literasi digital adalah secara umum adalah kemampuan untuk membaca dan memahami informasi dari sumber digital dan juga menciptakan informasi dalam berbagai format digital (Bawden; Gilster; Tyner; UNESCO, dalam Green, 2020). Pengertian lainnya mengenai literasi digital menurut Siberkreasi (2024) adalah kemampuan seseorang untuk memanfaatkan teknologi digital dengan efektif yang mencakup berbagai keterampilan, seperti keterampilan membaca, menulis,

memahami, menghitung, berbicara dan memecahkan masalah. Dapat disimpulkan bahwa literasi digital adalah serangkaian kemampuan untuk membaca, memahami, membuat informasi dari berbagai sumber.

Ng (2012) dalam penelitiannya merumuskan skema 3 bagian untuk mendiskusikan karakteristik dari seseorang yang kompeten secara digital, diantaranya adalah literasi teknis, literasi kognitif dan literasi sosial-emosional. Literasi teknis adalah keterampilan untuk mengoperasikan teknologi, seperti mengoperasikan komputer, menggunakan keyboard dan mouse dan lainnya. Literasi kognitif adalah kemampuan untuk berkomunikasi di lingkungan digital baik secara sosial maupun profesional, memahami keamanan siber, mengikuti protokol "netiquette", dan menavigasi diskusi dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kesalahan representasi atau kesalahpahaman. Kesimpulannya, kompetensi digital seseorang mencakup tiga aspek utama yaitu literasi teknis sebagai keterampilan mengoperasikan teknologi, literasi kognitif yang melibatkan komunikasi efektif dan

keamanan di lingkungan digital, serta literasi sosial-emosional untuk mengelola interaksi digital dengan bijaksana agar menghindari kesalahpahaman. Literasi digital memiliki peran penting dalam kehidupan *modern*, terutama dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah di era digital yang kompleks (Cynthia & Sihotang, 2023). Hal ini sejalan dengan pernyataan Restianty (2018, dalam Rahim & Indah, 2024) yang mengungkapkan bahwa literasi digital memuat kemampuan seseorang untuk menganalisis isi pesan dari konten yang tersedia secara kritis. Perkembangan teknologi saat ini telah mengubah banyak hal termasuk cara pandang seseorang sehingga pengambilan keputusan menjadi tantangan tersendiri di era ini (Cahyani et al., 2024). Oleh karena itu, pendidikan literasi digital sebagai *soft skill* perlu dimiliki terutama oleh remaja karena remaja adalah salah satu kelompok yang paling terpengaruh oleh teknologi informasi dan komunikasi (Rahim & Indah, 2024). Upaya tersebut perlu dilakukan karena saat ini media sosial adalah salah satu sumber informasi utama, tetapi tidak

semua konten yang diunggah adalah data faktual dan positif. Akan tetapi, di sisi lain literasi digital juga mampu membuka akses informasi yang luas serta mendorong pembelajaran mandiri dan kolaboratif, memungkinkan individu untuk menggunakan teknologi secara efektif dan bertanggung jawab (Cynthia & Sihotang, 2023).

Penelitian ini membedakan diri dari penelitian terdahulu dengan memberikan konsep literasi digital tidak hanya sebagai kemampuan teknis, tetapi juga melihat aspek kognitif dan sosial-emosional dalam konteks bela negara yang masih jarang diangkat secara komprehensif. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menyoroti peran literasi digital sebagai cara untuk melindungi bangsa dan negara melalui peningkatan kemampuan berpikir kritis, dan kesadaran identitas bangsa. Hal ini penting mengingat tingginya penyebaran hoaks dan polarisasi yang dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti bias konfirmasi dan *echo chamber* di media sosial, yang menyebabkan fragmentasi sosial dan mengancam persatuan bangsa.

Penelitian ini membedakan diri dari penelitian terdahulu dengan memberikan konsep literasi digital tidak hanya sebagai kemampuan teknis, tetapi juga melihat aspek kognitif dan sosial-emosional dalam konteks bela negara yang masih jarang diangkat secara komprehensif. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menyoroti peran literasi digital sebagai cara untuk melindungi bangsa dan negara melalui peningkatan kemampuan berpikir kritis, dan kesadaran identitas bangsa. Hal ini penting mengingat tingginya penyebaran hoaks dan polarisasi yang dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti bias konfirmasi dan *echo chamber* di media sosial, yang menyebabkan fragmentasi sosial dan mengancam persatuan bangsa.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, penyebaran hoaks di era digital ini telah menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari menurunnya kualitas informasi hingga meningkatnya polarisasi. Rendahnya literasi digital di masyarakat juga ditambah penggunaan media sosial yang semakin meningkat membuat penyebaran hoaks menjadi lebih

sulit untuk dikendalikan. Selain itu, dinamika identitas sosial turut memperkuat kecenderungan individu untuk mempercayai dan membagikan hoaks yang sejalan dengan kelompoknya. Oleh karena itu, muncul pertanyaan “Bagaimana peran literasi digital dalam konteks bela negara dapat menjadi upaya efektif untuk menangkal hoaks dan mencegah polarisasi di masyarakat digital saat ini?”

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sistematis *literature review* melalui *platform* seperti Google Scholar dan ResearchGate. Penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa artikel jurnal terpercaya dalam 5-6 tahun terakhir yaitu dari tahun 2019 - 2025 untuk dianalisis. Setelahnya, peneliti akan menganalisis artikel-artikel yang telah terkumpul dengan cara membandingkan isi satu dan lainnya untuk melihat perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Selanjutnya, peneliti akan mengambil satu kesimpulan yang mencakup keseluruhan hasil.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Ajib et al. (2024) yaitu kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di SMKS Al Mummtaz di Subang, Indonesia, bertujuan untuk memperkenalkan dan menguatkan literasi digital di kalangan siswa. Program ini ditujukan para pelajar untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola media sosial secara bijak dan mengidentifikasi berita hoaks. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa para siswa tidak hanya lebih berhati-hati dalam menerima informasi yang beredar di media sosial, tetapi juga lebih termotivasi untuk menggunakan media sosial secara lebih bijaksana dan kritis. Dalam hal ini, literasi digital tidak hanya berfungsi sebagai keterampilan teknis dalam mengakses informasi, tetapi juga sebagai kemampuan untuk menilai kredibilitas sumber informasi dan menghindari dampak negatif dari informasi yang menyesatkan. Kegiatan ini juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat, dalam

membentuk sikap kritis terhadap informasi yang diterima. Secara keseluruhan, kegiatan ini berperan penting dalam membentuk individu yang lebih tanggap terhadap dampak negatif berita hoaks yang beredar di dunia maya .

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Mursyida (2023) juga membahas bahwa literasi digital mengacu pada kapabilitas dalam mengolah informasi, mengetahui pesan, serta hubungan yang tepat dengan tiap orang dengan cara yang berbeda, dengan hal tersebut akan menumbuhkan pemikiran kritis dan pandangan kreatif di kalangan masyarakat yang membuat mereka tidak akan mudah terprovokasi oleh berita kontroversial. Sehingga kehidupan sosial masyarakat akan terus aman dan sejahtera. Mursyida (2023) berpendapat bahwa pengguna media sosial perlu sadar akan kondisi digital agar dapat membedakan informasi yang relevan dan terpercaya dengan informasi hoaks, dengan begitu masyarakat yang giat menggunakan sosial media perlu literasi digital agar aktivitas pencarian lebih relevan. Literasi digital di

Masyarakat dapat mengajarkan setiap individu bagaimana manfaat teknologi secara maksimal melalui bantuan teknologi digital atau jaringan komunikasi digital dalam mencari, mendapatkan, menilai, memanfaatkan, serta menciptakan informasi yang akurat. Hal tersebut dapat membantu Masyarakat agar tidak mudah terprovokasi, dan dapat membedakan informasi yang asli dan relevan dengan informasi palsu. Dengan meningkatkan kualitas literasi digital, masyarakat akan mampu membedakan, memfilter, dan melakukan pemeriksaan ulang informasi sehingga masyarakat dapat mencegah penyebaran berita palsu atau hoaks.

Penelitian lainnya mengenai literasi digital juga dilakukan oleh Fitriarti (2019) yang berfokus pada fenomena hoaks dalam konteks informasi kesehatan yang tersebar di media sosial, dengan contoh kasus mengenai hoaks vaksin yang menyebabkan keresahan di masyarakat. Penelitian ini mengungkapkan bagaimana penyebaran informasi yang salah tentang vaksin banyak beredar di *platform* digital dan memengaruhi pandangan orang tua dan

masyarakat luas mengenai vaksinasi. Banyak orang tua yang terpapar informasi hoaks ini menjadi ragu dan menolak untuk memberikan vaksin kepada anak-anak mereka, yang pada akhirnya dapat membahayakan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Artikel ini menunjukkan bahwa meskipun banyak orang sudah menguasai teknologi digital, kemampuan untuk memverifikasi informasi kesehatan yang diterima masih rendah, sehingga mereka mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak akurat. Di sinilah pentingnya literasi digital, bukan hanya mengajarkan keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan untuk berpikir kritis dan selektif dalam menerima dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan kesehatan. Artikel ini juga menyoroti pentingnya peran edukasi digital dalam mengurangi dampak hoaks, terutama dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana hoaks dapat memengaruhi kesehatan publik.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian lainnya yang dilakukan oleh Candra dan Alifiana (2021) mengenai polarisasi juga telah

terjadi di masa pandemi COVID-19. Menurut Prastiwi dalam Candra dan Alifiana (2021), penyebaran berita-berita hoaks mengalami peningkatan yang sangat signifikan, seperti konspirasi COVID-19 dan dampak-dampak buruk vaksin COVID-19. Pada masa pandemi COVID-19, banyak sekali informasi-informasi yang bercampur dengan beragam opini, spekulasi, hoaks yang saling bertindihan satu sama lain. Kominfo (dalam Candra & Alifiana, 2021) mencatat per tanggal 6 April 2021 telah terdapat 1,513 berita hoaks yang bertebaran mengenai COVID-19. Artikel ini juga menyebutkan di era digital saat ini, penyebaran berita hoaks sangat mudah tersebar luas di masyarakat. Polarisasi yang terjadi dapat berdampak buruk pada masyarakat, seperti terciptanya perpecahan diantara masyarakat, munculnya rasa tidak aman pada masyarakat, menurunnya kredibilitas masyarakat, dan rusaknya institusi demokrasi. (Rianadiwa, et al, 2024). Menurut Rianadiwa et al (2024), upaya yang bisa dilakukan masyarakat untuk mencegah polarisasi adalah masyarakat harus mampu untuk bersikap kritis

terhadap isu-isu yang beredar. Hal ini diperkuat oleh Candra & Alfiana, menurutnya setiap orang harus mampu untuk bersikap pintar dalam menerima dan menyebarkan informasi yang mereka terima. Artikel ini juga menambahkan pentingnya melakukan kampanye literasi digital untuk menciptakan lingkungan dunia digital yang sehat dan kritis.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Rianadiwa et al (2024) juga menyebutkan bahwa polarisasi sering kali terjadi di tahun pemilu, seperti yang terjadi di tahun 2024 dan 2019. Polarisasi politik yang terjadi membagi masyarakat dalam pandangan dan dukungan politik mereka, menjadi masyarakat yang saling berkelompok dan saling bertentangan akibat perbedaan pilihan politik, ideologi, atau nilai. Banyaknya isu-isu atau hoaks yang bertebaran di media massa, seperti media sosial, menjadi salah satu penyebab terjadinya polarisasi politik.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat diambil dari

penelitian ini adalah hoaks merupakan ancaman yang serius di era digital saat ini, tidak hanya menurunkan kualitas informasi yang beredar tetapi juga menimbulkan dampak polarisasi di masyarakat, termasuk polarisasi dalam bidang kesehatan dan politik. Penyebaran hoaks terjadi akibat rendahnya literasi digital, bias kognitif individu, dan juga pengaruh media sosial. Oleh karena itu, literasi memegang peran penting disini untuk mencegah penyebaran yang semakin meluas dan juga memperbaiki pola kognitif masyarakat agar mampu menganalisis dan membedakan informasi benar dan salah. Dengan demikian, peningkatan kampanye literasi digital pada masyarakat dibutuhkan sebagai bentuk bela negara dengan membangun stabilitas sosial dan ketahanan nasional melalui penggunaan teknologi yang baik dan bijak, serta bertanggung jawab.

Pemerintah dan masyarakat juga perlu bekerja sama mewujudkan tujuan tersebut dengan mengembangkan program literasi digital yang komprehensif dan berkelanjutan. Program tersebut

sebaiknya tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis, tetapi juga membangun kesadaran kritis, etika bermedia, serta rasa tanggung jawab sosial dalam menggunakan teknologi. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi mengenai bahaya hoaks dan dampak polarisasi agar masyarakat menjadi lebih kritis terhadap informasi yang beredar di media sosial. Peran keluarga dan institusi pendidikan juga sangat penting dalam membentuk kebiasaan berpikir kritis sejak dini. Dengan demikian, literasi digital dapat menjadi pondasi kuat untuk membangun masyarakat yang cerdas informasi dan berkontribusi pada ketahanan bangsa di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Aïmeur, E., Amri, S., & Brassard, G. (2023). Fake news, disinformation and misinformation in social media: A review. *Social Network Analysis and Mining*, 13(30), 1–20. <https://doi.org/10.1007/s13278-023-01028-5>
- Ajib, E. N., Farhani, S., & Khiarotunnisa. (2024). Pemberdayaan pelajar melalui literasi digital guna mengantisipasi berita hoax di media sosial. *Archive: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 59–65. <https://doi.org/10.55506/arch.v4i1.123>
- Akbar, R. S. (2024). Bela negara di era digital: Tantangan dan strategi memperkuat nilai-nilai kebangsaan melalui teknologi. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(4), 8418-8428. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.1078>
- Batoebara, M. U., & Hasugian, B. S. (2023). Isu hoaks meningkat menjadi potensi kekacauan informasi. *Device: Journal of Information System, Computer Science and Information Technology*, 4(2), 64-79.
- Beauvais, C. (2022). Fake news: Why do we believe it? *Joint Bone Spine*, 89(4), 105371. <https://doi.org/10.1016/j.jbspin.2022.105371>

- Cahyani, N., Hutagalung, E. N. H., & Harahap, S. H. (2024). Berpikir Kritis melalui membaca: Pentingnya literasi dalam era digital. *Indonesian Journal of Education and Development Research*, 2(1).
- Cathy L. Green, Oklahoma State University. (2020, August 28). Digital literacies and the skills of the digital age. *Learning in the Digital Age*. <https://open.library.okstate.edu/learninginthedigitalage/chapter/digital-literacies-and-the-skills-of-the-digital-age/>
- Cynthia, R. E., & Sihotang, H. (2023). Melangkah Bersama di Era Digital: Pentingnya Literasi Digital untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dan Kemampuan Pemecahan Masalah Peserta Didik. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 31712–31723.
- Daeli, S. H., Pohan, N. N. I., Simorangkir, R. F. P. B., Syahwana, N., Harahap, B. S., Panjaitan, D. A. S., Maharani, C., & Jamaludin, J. (2024). Polarisasi politik di media sosial: Telaah filsafat persatuan Indonesia di era digital. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 5(10), 91–100. <https://doi.org/10.6578/triwikrama.v5i10.7730>
- Dulkiah, M. (2023). Social trust and fake news: Study among college students in West Java, Indonesia. *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, 5(1). <https://doi.org/10.51486/jbo.v5i1.81>
- Eshet, Y. (2004). Digital Literacy: A Conceptual Framework for Survival Skills in the Digital era. *Journal of Educational Multimedia and Hypermedia*, 13(1), 93-106. *Norfolk, VA: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE)*. <https://www.learntechlib.org/primary/p/4793/>
- Fitriarti, E. A. (2019). Urgensi literasi digital dalam menangkal hoax informasi kesehatan di era digital. *MetaCommunication: Journal of Communication Studies*, 4(2), 234–246.
- Hatoguan, E. S. H., Sihombing, A. H., & Gulo, M. (2025). Hoaks

- dan pikiran manusia: Sebuah analisis psikologi kognitif. *Indonesian Research Journal on Education (IRJE)*, 9(1), 64–77.
- Rabb, N., Zhou, S., & Rand, W. (2023). Investigating the effect of selective exposure, audience fragmentation, and echo-chambers on polarization in dynamic media ecosystems. *Applied Network Science*, 8(1), 68. <https://doi.org/10.1007/s41109-023-00601-3>
- Mufarriq, M. U. (2021). Aktualisasi nilai-nilai bela negara pemuda melalui Unit Kegiatan Mahasiswa Persaudaraan Setia Hati Terate. *Jurnal Dinamika Governance (JDG)*. <http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/2496>
- Ng, W. (2012). Can we teach digital natives digital literacy? *Computers & Education*, 59(3), 1065–1078. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.04.016>
- Nugroho, H. A., & Arifin, M. (2023). Polarisasi berita bohong COVID-19: Viktimisasi kolektif. *Litigasi: Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasundan*, 24(1), 45–67. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/4057/1942>
- Nature. (1953). Piltdown man. *Nature*, 172(4381), 981–982. <https://doi.org/10.1038/172981a0>
- Online Etymology Dictionary. (n.d.). Hoax. <https://www.etymonline.com/word/hoax>
- Online Etymology Dictionary. (n.d.). Hocus-pocus. <https://www.etymonline.com/word/hocus-pocus>
- Puspaningrum, E., Pradnyana, I. B. K., & Pratama, D. A. (2025). Pertanggungjawaban pidana penyebaran hoaks menurut Pasal 28 UU ITE. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 2(1), 33–45.
- Rahim, A. (2024). Pentingnya Pendidikan Literasi Digital di Kalangan Remaja. *SABAJAYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(02), 51-56.
- Rahmawati, D. (2020). Risiko Polarisasi Algoritma Media

- Sosial: Kajian terhadap Kerentanan Sosial dan Ketahanan Bangsa. *Jurnal Lemhannas RI*, 6(1), 37-50. <https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/114>
- Santoso, R. D., & Rahmawati, F. (2024). Upaya pencegahan polarisasi politik di tahun Pemilu 2024. *Sapientia: Jurnal Ilmiah Filsafat dan Humaniora*, 10(2), 12–24. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/Sapientia/article/view/7548/4378>
- Siberkreasi. (2024, Mei 10). Apa itu literasi digital? Secara umum, inilah pengertiannya. *GNLD Siberkreasi*.
- Silalahi, M. A. (2023). Pengaruh literasi digital terhadap kemampuan berpikir kritis mahasiswa di era disinformasi. *Jurnal Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran*, 8(3), 221–235. <https://online-journal.unja.ac.id/jtpd/article/view/22866/16214>
- Syam, H. M., & Nurrahmi, F. (2020). “I Don’t Know If It Is Fake or Real News”: How Little Indonesian University Students Understand Social Media Literacy. *Malaysian Journal of Communication*, 36(2), 92–105. <https://doi.org/10.17576/JKMJC-2020-3602-06>
- Sultan, M., Tump, A. N., Ehmann, N., Lorenz-Spreen, P., Hertwig, R., Gollwitzer, A., & Kurvers, R. H. J. M. (2024). Susceptibility to online misinformation: A systematic meta-analysis of demographic and psychological factors. *Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)*, 121(47), e2409329121. <https://doi.org/10.1073/pnas.2409329121>
- Sugiono, S. (2021). Polarisasi sebagai dampak menguatnya kelompok anti-vaksin COVID-19 di media sosial (Perspektif Echo Chamber). *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, 25(2), 166–182.
- Syah, R. F., Lestari, P., & Kusuma, A. (2025). Hoax and election: The role of social media in shaping political opinion. *Studies in Media and Communication*, 13(2), 145–157.

- Straus, W. L. (1954). The great Piltdown hoax. *Science*, 119(3087), 265–266.
<https://doi.org/10.1126/science.119.3087.265>
- Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. *The social psychology of intergroup relations* (33–47). Monterey, CA: Brooks/Cole.
- Yulnelly, & Setiyawati, M. E. (2023). Pemahaman nilai-nilai bela negara generasi muda dalam menghadapi informasi di era digital. *IKRA-ITH Humaniora*, 7(2).
<https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v7i2.2298>